



Strategi Kesbangpol Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Arsyi¹, Rahmad²

¹ Kabid Poldagri, Kesabngpol Aceh, Indonesia

² Universitas Al-Muslim Peusangan, Jalan Almuslim, Matanggumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh 24261, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: February 18, 2022

Revised: June 23, 2022

Available online: September 30, 2022

KEYWORDS

Strategy, Kesbangpol Aceh, Beginner Voters

CORRESPONDENCE

Name: Arsyi

E-mail: amyusuf3103@gmail.com

A B S T R A C T

The focus of the discussion of this study is how the strategy of the National Unity and Politics Agency in providing political education based on existing problems by increasing public awareness, especially among beginner voters in the 2024 election participation. Running well or not in the implementation of political education. This research method uses exploratory research with a literature study approach. The data collection technique used by researchers in this study is secondary data. The political education program for novice voters in Aceh Province has been implemented properly. However, this activity was hampered due to the impact of the Covid-19 pandemic, so the re-focusing of the budget resulted in various programs not running properly.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Kesbangpol Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu di Provinsi Aceh. Berhubungan dengan partisipasi pemilu merupakan bentuk keikutsertaan pemilih (masyarakat) dalam setiap tahapan pemilihan (Setiawan, 2022). Apabila dalam suatu wilayah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin, maka saat itu terjadi partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih dengan ikut terlibat dalam proses pemilihan umum (Arni, 2020). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerring (2021) sebagai negara demokrasi, partisipasi warga negara merupakan sebuah nafas, dalam hal ini Indonesia. Karna bagian dari Indonesia, Provinsi Aceh akan melaksanakan pemilu pada tahun 2024 mendatang, diperlukan sebuah strategi baru yang dilakukan Kesbangpol Provinsi Aceh agar partisipasi pemilih dapat meningkat, khususnya untuk pemilih pemula di Aceh (Nofriadi et al., 2021; Zulfan et al., 2022).

Pemilu Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali, kisaran pemilih pemula ada dikisaran usia 17 hingga 21 tahun (Irawan, 2020). Kelompok pemilih ini ada di rata-rata berada di jenjang awal pendidikan tinggi, setingkat SMA atau mereka yang hampir lulus (Rohim & Wardana, 2019). Sedangkan untuk kategori politik, pemilih pemula merupakan kelompok pertama yang menggunakan hak pilihnya dan menjadikan posisi mereka (pemilih pemula) menjadi sasaran strategis, dikarenakan: (1) Pemilih pemula memiliki jumlah yang cukup besar disetiap pemilu; (2) Pemilih pemula baru pertama kali mengikuti pemilu, perlu ada pemahaman yang baik berkaitan dengan pemilu dan demokrasi; dan; (3) Pemilih pemula sebagai pemimpin masa depan, perlu mengetahui pandangan mereka dan memberikan pembekalan untuk masa depan berkaitan dengan pemilu dan demokrasi (Ansori, 2019; Mahmudah, 2016; Rohim & Wardana, 2019).

Untuk tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2014 di Provinsi Aceh mencapai 77,58 persen sedangkan di tahun 2019

mengalami peningkatan mencapai angka 79,7 persen, angka ini lebih tinggi dari target nasional sebanyak 77,5 persen. Namun, tingginya partisipasi pemilih tidak dibarengi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPR Aceh yang hanya mencapai angka 11,1 persen (Acehinstitute, 2019). Tentu, capaian ini harus menjadi perhatian khusus agar di pemilu 2024 yang akan datang tingkat partisipasi pemilih dan keterwakilan wanita semakin meningkat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan agar ada peningkatan partisipasi pemilih dengan melaksanakan program pendidikan politik untuk pemilih pemula di Provinsi Aceh (Bawaslu Aceh, 2020).

Pendidikan Politik seperti sosialisasi pemilu sangat penting bagi pemilih pemula sebagai proses pembentukan dan pengembangan pendidikan untuk warga negara (Primadi et al., 2019; Tamma, 2021). Hal ini penting didapatkan oleh pemilih pemula untuk dapat mempertimbangkan kualitas calon yang akan dipilih (Wance, 2018). Dengan diadakan sosialisasi pemilu pemilih pemula ini, dapat mengetahui bagaimana cara memilih dan membangun kesadaran dan daya kritis dalam mengikuti pemilu (Setyawan & Azmi, 2020). Kehadiran pemilih pemula bukan sebagai objek melainkan subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan individu maupun perorangan (Kartoni, 2022). Data Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditinjau dari tahun 2014 sampai 2022, sebagai berikut pada tabel 1:

Tabel 1: Jumlah Peserta Pemilih

No	Tahun	Jumlah Peserta
1	2014	190.307.134
2	2019	187.781.884
3	2022	190.659.348
4	2022 (Pemilih Pemula)	105.852.716

Sumber: KPU Indonesia (2022)

Untuk merespon hal ini, Pemerintah Aceh telah membuat aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Aceh, maka KESBANGPOL Aceh mempunyai fungsi utama tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa & politik dalam negeri, dalam melaksanakan tugas pokoknya. KESBANGPOL Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Perumusan kebijakan strategis; (2) Laporan bimbingan, pemantauan, evaluasi & kegiatan; (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Melihat dinamika yang terjadi belakangan ini, masih banyak anak muda yang tidak melek politik atau mati rasa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan politik (Sarinastiti & Fatimah, 2019). Hal ini terjadi karena dampak dari minimnya pendidikan politik dalam mengajak para pemuda tersebut untuk turun tangan dan berperan aktif dalam berbagai aktivitas politik yang ada (Meiji, 2016).

KESBANGPOL Aceh memiliki strategi dengan bentuk program dan kegiatannya yaitu Pendidikan Politik. Program dan kegiatan pendidikan politik tersebut meliputi: (1) Sosialisasi kepada masyarakat; (2) Koordinasi forum diskusi politik; (3) Penyusunan database partai politik, serta; (3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Data yang diperoleh dari KESBANGPOL Aceh menunjukkan bahwa Aceh memiliki tambahan 123.655 pemilih Pemula diterbit oleh lembaga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh. Sebagai harapan, untuk mewujudkan pesta demokrasi ini, Kesbangpol Aceh di sini memiliki peran vital melalui pendidikan politik bagi generasi muda.

Menurut Rhodes (2015) pendidikan politik merupakan pengembangan sikap dan proses pembentukan perilaku politik seseorang. Dengan melihat nilai-nilai politik dilakukan dengan sengaja, terencana, dan dilakukan terus menerus agar warga negara dapat ikutserta dalam politik dan sadar akan hak dan kewajibannya secara kolektif dan bertanggung jawab (Kuenzi, 2011). Untuk itu mewujudkan itu, penting adanya strategi untuk melihat tingkat keberhasilan dalam membuat sebuah program (Berry, 2015). Pendidikan politik untuk kaum muda atau pemilih pemula sebagai upaya menciptakan budaya partisipasi dengan melibatkan warga negara (Setiawaty, 2014). Melalui pendidikan politik ini, pemilih pemula diberikan akses informasi dan transfer pengetahuan walaupun mereka tidak terafiliasi atau tergabung kedalam partai politik (Mahmudah, 2016). Menurut Kodiyat & Andryan, (2021) pendidikan politik untuk pemilih pemula diberikan memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut: (1) Diberikan pengetahuan berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan; (2) Membentuk kepribadian dan kesadaran berpolitik; (3) Meningkatkan pengetahuan etika didalam berpoliti, dan; (4) Mendorong kesadaran partisipasi politik aktif ditengah warga negara. Seperti dalam penelitian ini terkait strategi Kesbangpol Aceh dalam melaksanakan pendidikan politik dalam bentuk sosialisasi yang menyasar kepada pemilih pemula yang ada di Aceh. Strategi merupakan suatu proses rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2010). Strategi juga diartikan sebagai proses yang direncanakan oleh pimpinan, memiliki fokus dan tujuan jangka panjang, disertai cara dan upaya agar tujuan tersebut tercapai di sebuah organisasi (Riniwati, 2016). Sedangkan mengemukakan Lynch, (2006) strategi sebagai pola terencana untuk diintegrasikan

sebagai kebijakan dengan berbagai rangkaian tindakan yang saling mengikat dengan prinsip-prinsip untuk suatu hal yang ingin dicapai.

Selanjutnya, Yunus (2016) strategi merupakan perencanaan dan manajemen agar tercapainya tujuan. Dapat diartikan bahwa strategi sebagai rencana dalam mencapai target meskipun tidak ada jaminan keberhasilannya. Sedangkan dalam konteks lembaga, strategi dapat membantu dalam menyelesaikan tujuan yang ingin di gapai, dengan cara menjalin komunikasi dengan masyarakat selama proses sosialisasi politik (Rahman et al., 2019). Surbakti (2010) sosialisasi politik merupakan bentuk proses sikap dan orientasi politik kepada anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik ini, anggota masyarakat akan memperoleh langsung sikap dan orientasi dari kehidupan politiknya. Surbakti (2010) menambahkan, ditinjau dari penyampaian pesan, sosialisasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: (1) Pendidikan politik sebagai proses dialogik, karena posisinya sebagai pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat dapat mengetahui nilai, norma, dan simbol politik, dan; (2) indoktrinasi politik yaitu ketika penguasa mampu memanipulasi masyarakat secara sepihak untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang diasumsikan ideal dan baik menurut penguasa.

Pemberian informasi dan transfer pengetahuan melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula walaupun tidak tergabung kedalam partai politik (Ansori, 2019). Adapun fungsi dan tujuan diberikannya pendidikan politik untuk pemilih pemula, diantaranya: (1) Membangun kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan; (2) Membentuk kepribadian dan kesadaran berpolitik; (3) Meningkatkan pengetahuan etika didalam berpolitik; serta (4) Mendorong kesadaran partisipasi politik aktif ditengah warga negara (Abdullah, 2017). Berdasarkan analisa situasi yang telah dipaparkan diatas, Kesbangpol Aceh memiliki tanggung jawab kepada pemilih pemula dengan memberikan pendidikan atau sosialisasi politik mengarahkan generasi muda yang mampu berpikir kritis, rasional dan cerdas dalam membuat keputusan politik. Sebagai generasi penerus, tidak dapat dipungkiri harapan bangsa dan negara ini ada di masa akan datang.

METODE

Penelitian ini memakai penelitian eksplorasi, bertujuan untuk mempelajari lebih jauh tentang strategi Kesbangpol Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu di Provinsi Aceh. Teknik penelitian adalah studi kepustakaan, dan data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jurnal, buku-buku terkait, peraturan, data yang relevan untuk mendukung kajian penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, kemudian akan dianalisis sesuai dengan pembahasan penelitian yang diangkat. Data yang dipandang sesuai dengan yang dibutuhkan penulis, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam bahasan penelitian dan tidak lupa mencantumkan referensi apabila mengutip dari sumber-sumber tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kesbangpol Aceh

Kesbangpol adalah organisasi perangkat daerah yang mengurus kesatuan bangsa dan politik (Wardhani, 2018). Kedudukan kesbangpol berada di bawah pemerintahan gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris

daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Aceh, Kesbangpol Aceh mempunyai fungsi utama tugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan wajib kesatuan bangsa & politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kesbangpol Aceh mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan strategis; (2) Laporan bimbingan, pemantauan, evaluasi & kegiatan; (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Berbagai jenis program telah dilakukan oleh Kesbangpol Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan, sebagai contoh dalam melakukan pendidikan politik meskipun tugasnya hanya sebagai unsur penunjang pemerintahan bukan sebagai badan khusus, seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP) memiliki tugas khusus berkaitan dengan pendidikan politik.

Kesbangpol melakukan pendidikan politik dan peningkatan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hasanah et al., 2021). Walaupun sifat tugasnya melaksanakan hanya sebagai unsur penunjang pemerintahan bukan sebagai badan khusus, seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang memang bertugas khusus dalam menjalankan segala urusan terkait dengan pendidikan politik. Dalam melaksanakan bentuk pendidikan politik, jika diimplikasikan dengan pendapat dari Kantaprawira (2004), kesbangpol merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan politik melalui berbagai sosialisasi-sosialisasi yang diselenggarakan. Khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan politik untuk pemilih pemula. Jika merujuk Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 mengatakan bahwa pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang ketika hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap mencapai usia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang memiliki hak pilih, dan sebelumnya tidak termasuk pemilih disebabkan ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Strategi Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Dalam melaksanakan pendidikan politik, upaya yang bisa dilakukan oleh Kesbangpol Aceh adalah melaksanakan berbagai bentuk pendidikan politik. bentuk-bentuk pendidikan politik menurut Kantaprawira (2004) dapat dilakukan melalui: Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, maupun bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum lainnya; siaran radio, televisi, serta film (media yang berbentuk audio-visual); lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Kesbangpol Aceh bisa menyelenggarakan proses pendidikan politik secara maksimal dengan tatap muka langsung dengan para peserta. Pendidikan politik untuk pemilih pemula dilaksanakan melalui program safari/roadshow ke sekolah-sekolah menjelang pemilu yang akan datang. Sosialisasi yang dilakukan kepada para peserta didik SMA yang rata-rata berusia 17-19 tahun yang merupakan pemilih pemula dengan tujuan utamanya memberikan informasi dan pengetahuan seputar pemilu dan dapat mecablos dengan baik dalam pemilu maupun pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, tujuan dari diadakannya sosialisasi ini adalah untuk menghindari penyebaran berita hoax atau berita palsu pada tahun 2024 yang cukup sering terjadi di

pemilu beberapa tahun terakhir. Apalagi pemilih pemula merupakan salah satu kelompok yang rawan digiring opini atau berita palsu yang bisa membahayakan keamanan dan kondusifitas masyarakat. Cara yang dilakukan bervariasi dilakukan oleh Kesbangpol Aceh melihat kondisi segmen masyarakat yang dituju selama proses sosialisasi. Menurut Bapak Drs. Mahdi Effendi selaku Kepala Dinas Kesbangpol Aceh, mengatakan: "Sosialisasi dalam pemilihan itu merupakan proses menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tentang tahapan dalam penyelenggaraan pemilu ditahun 2024 (Kesbangpol Aceh, 2022). Strategi ini diyakini sebagai proses kegiatan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan yang telah ditentukan.

Salah satu pelaksanaan kegiatan Kesbangpol Aceh yang menasar ke pemilih pemula ini berlangsung di Kabupaten Bener Meriah, pesertanya pengurus karang taruna. Kegiatan ini bertujuan membentuk gampong percontohan demokrasi, sehingga mampu membentuk karakter komunitas anti politik uang untuk daerah tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh akademisi dari berbagai kampus di Provinsi Aceh. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala bidang politik dalam negeri Kesbangpol Aceh, Drs Arsyi, M.Si. Selain kelompok karang taruna, kegiatan Kesbangpol Aceh dalam memberikan pendidikan politik menasar ke sekolah-sekolah yang ada di Aceh (Kesbangpol Aceh, 2022).

Agenda Kesbangpol Aceh melalui kapid Poldagri bapak Drs Arsyi mengadakan kegiatan pendidikan politik sebagai salah satu media untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kesbangpol Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dihadiri dari berbagai kalangan, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), tokoh pemuda, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan aktivis perempuan. Kegiatan yang serupa juga dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam pemilu meskipun pelaksanaannya masih jauh. Selain itu, mengajak unsur-unsur masyarakat menjadi aktivis politik untuk menjaga etika dan kesatuan (Kesbangpol Aceh, 2022).

Kesbangpol Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan politik dalam kurun 2 tahun terakhir terganggu oleh adanya pandemi covid-19. Produktifitas 5 program yang sudah direncanakan Kesbangpol terhambat oleh adanya re-focusing atau pengalihan anggaran yang seluruhnya difokuskan untuk penanganan covid-19 sehingga Kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan tugas dan fungsinya belum efektif. di masa pandemi, target sosialisasi dari kesbangpol khususnya pemilih pemula yang didominasi para pelajar yang berusia 17-20 tahun melakukan pembelajaran di rumah secara daring, sehingga sosialisasi roadshow ke sekolah sebagai program utama kesbangpol dalam melaksanakan pendidikan politik belum bisa terlaksana. Selain itu, dikarenakan adanya re-focusing anggaran sehingga kesbangpol menyusun skala prioritas dalam penyusunan program dan pendidikan politik untuk pemilih pemula belum di rasa memiliki urgensi. sehingga kesbangpol fokus kepada target pendidikan politik kepada partai politik, kelompok wanita, dan lapisan masyarakat lainnya di Provinsi Aceh yang dirasa memiliki urgensi yang lebih yang dilakukan secara rutin bulanan. Di Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, kegiatannya masih memerlukan tatap muka dan jumlah peserta yang cukup banyak. Sehingga Kesbangpol sendiri kesulitan dalam melaksanakan pendidikan politik di masa pandemi. Selaln

itu, sebagai lembaga unsur penunjang, kerja-kerja kesbangpol juga menyesuaikan dengan arahan dari pimpinan yaitu gubernur dalam melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan lembaga yang berkecimpung langsung seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Tahun 2022, agenda yang akan direncanakan Kesbangpol Aceh mulai kembali memprioritaskan pemilih pemula dalam penyelenggaraan pendidikan politik, program yang akan dilaksanakannya antara lain melaksanakan kembali roadshow ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula. Selanjutnya melaksanakan pendidikan politik untuk pemilih pemula kepada komunitas-komunitas yang ada di Aceh. Program pendidikan politik kesbangpol sendiri jika mengacu pendapat dari Kantaprawira (2004) masuk salah satu kriteria lembaga yang merupakan penyelenggara pendidikan formal, sedangkan bentuk pendidikan politik menggunakan bahan bacaan atau media masih belum dilaksanakan dengan baik. Padahal secara pembiayaan, bentuk penggunaan dan bentuk pendidikan seperti publikasi massa dan penggunaan media lebih murah dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pendidikan politik untuk pemula perlu dilaksanakan secara masif yang dilakukan oleh Kesbangpol sebagai bentuk antisipasi kecurangan pemilu, pemilih pemula menjadi kelompok yang rentan tidak ikutserta berpartisipasi pada pemilu 2024 mendatang, karena mereka belum memahami dan tidak menganggap pemilu itu penting. Kehadiran mereka harus merasa penting untuk pembangunan bangsa, melahirkan wakil rakyat yang berkualitas dan pemimpin bangsa pro kepada rakyat. karena itu Kesbangpol Aceh hadir untuk menjangkau kelompok yang rentan tidak memilih atau golput, salah satunya pemilih pemula yang diberi pendidikan politik, sehingga mengetahui proses politik dan demokrasi, seperti yang diungkapkan oleh Saiful Effendi selaku kepala dinas Kesbangpol Aceh.

Kesbangpol Aceh dalam menjalankan program pendidikan politik melibatkan banyak orang, kelompok, dan organisasi lainnya. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi yang dilakukan agar pendidikan politik dapat berjalan sesuai harapan. Seperti keterlibatan akademisi kampus dianggap mampu mencerdaskan pemikiran dan lain sebagainya. Selain itu, untuk menjangkau wilayah aceh yang cukup luas agar program pendidikan politik dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya pemilih pemula. Keterbatasan anggaran dan wewenang menjadi hal yang mempengaruhi juga. Kedudukan Kesbangpol dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) berbeda juga membuat keterbatasan itu terjadi. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melakukan juga kegiatan yang serupa agar esensi pendidikan politik untuk pemilih pemula ini dapat terwujud dan sesuai harapan dan amanat konstitusi.

Meskipun Provinsi Aceh tidak melakukan pilkada pada tahun 2020-2022, tetapi kegiatan pendidikan politik ini tetap berjalan, sebagai persiapan di pemilu 2024 mendatang yang akan dilakukan serentak. Apalagi terjadinya pandemi membuat kegiatan pendidikan politik menjadi tertunda karena dibatasi pertemuan dan terjadinya *refocusing* anggaran membuat kegiatan menjadi terhambat. Pada tahun ini, kondisi sudah mulai membaik di mana kegiatan pendidikan politik mulai kembali dilaksanakan, dengan terjun langsung kedaerah-daerah yang ada di Aceh, dengan tetap memprioritaskan sasaran utamanya adalah pemilih pemula mereka yang masih duduk di SMA sederajat dan yang sudah tamat bersekolah.

KESIMPULAN

Selama masa pandemi Covid-19 mengalami hambatan dalam menjalankan program pendidikan atau sosialisasi politik ini tidak berjalan secara optimal. Seharusnya pelaksanaan program kerja sosialisasi politik telah dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena dampak pandemi menyebabkan rencana dan anggaran di alihkan kepada penanganan covid-19 sehingga terjadinya *re-focusing* anggaran. Setelah pandemi sudah dapat dikendalikan, Kesbangpol Aceh telah memulai program sosialisasi politik bagi pemilih pemula dengan bekerjasama Komisi Independen Aceh (KIP) Aceh untuk melaksanakan kegiatan atau safari ke Sekolah-sekolah SMA sederajat yang ada di Provinsi Aceh. Tujuan dari kegiatan ini, untuk meningkatkan partisipasi politik khusus bagi para pemilih pemula menjelang pemilu 2024.

REFERENSI

- Abdullah, M. Z. (2017). Kesadaran dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2012. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 14(2), 143-154. <https://doi.org/10.20422/jpk.v14i2.174>
- Aceh, B. (2020). *Pemilu 2019, Partisipasi Masyarakat Aceh Sangat Tinggi*. <https://aceh.bawaslu.go.id/pemilu-2019-partisipasi-masyarakat-aceh-sangat-tinggi/>
- Aceh, K. (2022). *Kesbangpol Aceh: Perlu Dibekali Pemahaman Politik Karena Pemilih Pemula Rentan Golput*. Acehinstitute. (2019). *JPA: Partisipasi Pemilih pada Pilpres 2014 Hanya 40-60%*.
- Ansori, Z. (2019). Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 49-62. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.812>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Berry, J. M. (2015). Lobbying for the people: The political behavior of public interest groups. In *Lobbying for the People: The Political Behavior of Public Interest Groups*. <https://doi.org/10.1515/9781400867301>
- Gerring, J., Knutsen, C. H., Maguire, M., Skaaning, S. E., Teorell, J., & Coppedge, M. (2021). Democracy and human development: issues of conceptualization and measurement. *Democratization*, 28(2), 308-332. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1818721>
- Hasanah, N., Mulka, S. R., Yudhistira, H., Inderawaspada, I., & Rudini, R. (2021). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 446-452. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11561>
- Irawan, A. D. (2020). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448>
- Kantaprawira, R. (2004). *The Indonesian Political System: An Introductory Model*. Sinar Baru. Bandung: Alensindo.
- Kartoni, K. (2022). Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih.

- Awasia: *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.110>
- Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4744>
- Kuenzi, M. T. (2011). Explaining Political Attitudes and Behavior. In *Education and Democracy in Senegal* (pp. 101–130). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230118911_6
- Lynch, R. L. (2006). *Corporate strategy*.
- Mahmudah, D. (2016). Akses Informasi Politik (Perspektif Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 20(2), 241. <https://doi.org/10.31445/jskm.2016.200208>
- Meiji, N. H. P. (2016). Pendidikan Politik dalam Kuasa Simbolik: Kajian mengenai Dinamika Politik Anak Muda yang Tergabung dalam Partai Politik di Kota Malang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), 103–116. <https://doi.org/10.17977/um021vli22016p103>
- Nofriadi, N., Almanzani, N. N., & Annisa, H. (2021). Optimalisasi Partai Aceh Sebagai Infrastruktur Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i1.20054>
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>
- Rahman, F. A., Rouf, M. F., Asyahidda, F. N., & Hufad, A. (2019). Bias Politik Dibalik Sebuah Media : Relevansi Sosialisasi Politik Di Indonesia. *Sosietas*, 8(2). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v8i2.14599>
- Rhodes, J. H. (2015). Learning Citizenship? How State Education Reforms Affect Parents' Political Attitudes and Behavior. *Political Behavior*, 37(1), 181–220. <https://doi.org/10.1007/s11109-014-9270-8>
- Riniwati, H. (2016). Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM - Harsuko Riniwati - Google Buku. In *UB Media Universitas Brawijaya Malang*. https://books.google.co.id/books?id=aulPDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=aulPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=msdm+adalah+kebijkan+dan+praktek+yang+dibutuhkan+ses
- Rohim, M., & Wardana, A. (2019). Analisis Politik Milenial : Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada PEMILU 2019 di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 47–63. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.47-63>
- Sarinastiti, N., & Fatimah, P. S. (2019). Edukasi komunikasi politik dalam menciptakan kesadaran dan minat pemilih perempuan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 44. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.19125>
- Setiawan, A. (2022). Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 59–68. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.114>
- Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3(1), 117–146. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/71>
- Setyawan, R., & Azmi, A. (2020). Persepsi Pemilih Pemula tentang Hak Memilih dalam Mengikuti Pemilu di Nagari Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. *Journal of Civic Education*, 2(5), 440–445. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.289>
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik.pdf*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tamma, S. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pembentukan Preferensi Politik Awal Pemilih Pemula. *Jurnal Politik Profetik*, 9(1), 43. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i1a3>
- Umar, H. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wance, M. (n.d.). *Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara*.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.
- Yunus, E. (2016). Manajemen Strategis. In *Andi Offset*. Yogyakarta. <file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/Makalah-Manajemen-Strategis-Subtutik-Handayani.pdf>
- Zulfan, Z., Amin, M., & Saleh, A. (2022). Strategi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Marginal pada Pemilu 2019. *Perspektif*, 11(2), 428–442. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5800>